

15

**PELUANG KERJA DAN KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
DI DAERAH LAHAN KERING: KASUS GUNUNGKIDUL**



Oleh :

Machmoed Effendhie

RPUSTAKAAN UGM

KI
30.9598
ff
.1

LAPORAN PENELITIAN

**KULTAS SASTRA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
1993/1994**

KKI
330.9598
Eff
P
C.1

**PELUANG KERJA DAN KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
DI DAERAH LAHAN KERING: KASUS GUNUNGKIDUL**



Oleh :

Machmoed Effendhie



LAPORAN PENELITIAN

**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
1993/1994**

 UNIVERSITAS GADJAH MADA UPT PERPUSTAKAAN	
Inv. ²⁹ 506	504/KKI/96 1s
Klas.	330. 9598
Selesai	



PENGANTAR

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hubungan pengaruh antara kondisi alam dan intervensi dari luar desa terhadap munculnya peluang kerja baru, baik itu peluang kerja di sektor pertanian maupun di luar pertanian, serta perubahan kehidupan sosial-ekonomi penduduk pedesaan. Pada dasarnya penelitian ini mencari hubungan sebab akibat dari meningkatnya atau menurunnya kehidupan ekonomi penduduk pedesaan di daerah lahan kering. Pengaruh politik masa lalu, tingkat kesuburan tanah atau kepadatan penduduk, dan pengaruh hubungan desa-kota yang semakin terbuka menjadi topik kajian penting.

Dengan melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi di daerah lahan kering serta respon masyarakat pedesaan terhadap introduksi pembangunan pertanian dan sektor-sektor penting lainnya, serta pengalaman historis yang berbeda dengan wilayah subur lainnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif historis bagi kajian perkembangan ekonomi di pedesaan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan pembangunan pedesaan dalam peningkatan peluang kerja dan pengentasan kemiskinan.

Rasanya tidaklah terlalu berlebihan jika diucapkan rasa terima kasih kepada terutama Dekan Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Begitu juga kepada pengelola DPP yang

telah mendukung terselenggaranya penelitian ini, tidak lupa diucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, meskipun telah diusahakan penyajian laporan sebaik mungkin, namun disadari disana-sini masih banyak kekurangannya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
II. GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN	5
III. PERUBAHAN TATA GUNA TANAH, POLA TANAM DAN TEK- NOLOGI PERTANIAN	13
1. Perubahan Tata Guna Tanah	13
2. Pola Tanam	19
3. Teknologi	21
IV. PERUBAHAN STRUKTURAL DAN PELUANG KERJA	25
1. Pola Pemilikan dan Penguasaan Tanah	25
2. Peluang Kerja Pertanian	29
3. Peluang Kerja di luar Pertanian	33
V. KESIMPULAN	35
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk di sebuah desa di Gunung Kidul yang berumur lima puluh tahunan ke atas, kalau ditanya: bagaimana kehidupan mereka pada tahun enam puluhan? Dengan segera mereka akan bercerita banyak terutama mengenai penderitaan ketika dilanda paceklik hebat akibat kekeringan dan mengganaskan hama tikus. Seorang informan menceritakan bahwa pada saat paceklik itu, harga satu pikul gaplek sama seniali dengan satu ekor sapi. Hal ini merupakan indikator bahwa betapa sengsaranya mereka pada waktu itu. Kemudian bagaimana nasib mereka yang pada saat itu sudah sangat miskin sekali dengan makanan pokok berupa tiwul yang bahannya dibuat dari gaplek. Pikiran ini akan segera terpancing hanyut ke dalam masa lalu mereka yang memilukan itu kalau tidak segera ingat bahwa hari ini (1993) saya berada di rumah salah seorang informan di sebuah desa yang rumahnya cukup bagus, dua orang anaknya bekerja di kota dan setiap bulan mengirim uang ke orang tuanya antara Rp 50.000 sampai Rp. 100.000.

Dihadapkan pada kenyataan yang nampak kini rata-rata penduduk desa penelitian terkesan cukup makmur dilihat dari segi papan, sandang, dan pangan, sementara sektor pertanian kurang mendukung, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa itu. Identifikasi tiga faktor sebagai variabel pendukung yakni: 1) berkembangnya pasar yang diiringi dengan melajunya ekonomi uang, 2) letak dan keadaan desa, dan 3) semakin menipisnya isolasi daerah akibat berkembangnya prasarana dan

sarana transportasi dan komunikasi. Ketiga variabel ini tidak berdiri sendiri tetapi satu dan lainnya saling pengaruh mempengaruhi.

Untuk kepentingan analisa, pembabakan waktu yang longgar dengan mengambil tahun 1969 sebagai masa peralihan, artinya periode sebelum tahun itu -- dengan melihat data-data yang tersedia -- diasumsikan belum terjadi perubahan secara besar-besaran. Kemudian periode sesudah tahun tersebut yang memang terasa sekali perubahan dan perkembangan, dijadikan pusat analisa. Namun demikian, batas waktu 1969 harus disepakati tidak merupakan batasan waktu yang kaku, karena perkembangan atau perubahan sebagai sebuah proses, akan sulit dikenali kapan perubahan itu dimulai dan berakhir. Sekalipun tidak dinyatakan secara tegas, gambaran mengenai periodisasi itu dapat ditemui dalam pembahasan selanjutnya.

Di pedesaan Jawa masih dipertahankan "harmoni sosial" demikian kata Geertz yang tersirat dari pernyataannya di bawah ini (1983, 97):

"karena bertambahnya jumlah penduduk desa dan terbatasnya sumber-sumber kekayaan, masyarakat desa Jawa tidaklah terpecah belah sebagaimana halnya di banyak negara yang kurang berkembang, menjadi golongan tuan tanah besar dan golongan budak-budak yang tertindas. Sebaliknya terpeliharalah suatu taraf homogenitas sosial ekonomis yang agak tinggi dengan membagi harta milik ekonomis itu ke dalam bagian yang kian lama kian mengecil, suatu proses yang ditempat lain saya sebut shared poverty".

Kalau kita gunakan konsep harmoni sosial budaya itu di desa desa di Gunung kidul, akan didapati bahwa sistem penyakapan selain mempunyai dimensi ekonomis juga mempunyai dimensi kultural yang berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan

harmoni sosial. Hal itu nampak sekali dengan masih kuatnya hubungan bapak-anak buah dalam satu sistem perlindungan tradisional yang berindikasi budaya.

Dalam melihat hubungan bapak-anak buah ini mengacu bahwa masing-masing pihak memberikan pelayanan yang sama-sama bernilai, sekalipun keseimbangan keuntungan yang diperoleh dari tukar menukar pelayanan tersebut lebih menguntungkan sang bapak. Unsur saling membutuhkan inilah sebenarnya yang membedakan hubungan demikian dengan hubungan yang bersifat coersive atau pemaksaan murni antara individu yang berbeda status sosial ekonominya. Namun apakah pernyataan Geertz: "bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan pengurangan sumber-sumber kehidupan petani berupa tanah tidak akan mengakibatkan munculnya dominasi antara petani kaya dengan petani miskin, masih bergaung setelah tahun 1970-an dengan gencarnya masukan teknologi pertanian modern? dan apakah hubungan bapak-anak buah ini masih ketat ketika isolasi desa dengan dunia luar semakin terbuka serta semakin membaiknya prasarana dan sarana transportasi komunikasi? Dengan kemudahan sarana transportasi dan komunikasi serta terbukanya peluang yang lebih baik bagi petani tuna kisma dan buruh serta tenaga kerja produktif untuk berusaha dan bekerja di kota, telah memancing mereka untuk melakukan migrasi musiman atau bekerja di luar desa dengan cara nglaju.

Penelitian ini di satu sisi mencoba menguji konsep Geertz dan di sisi lain mencoba mendiskripsikan dinamika hubungan antara sektor pertanian, kondisi alam dengan

munculnya sektor non-farm. Apakah dengan semakin banyaknya penduduk pedesaan di daerah Gunung kidul memasuki bermacam macam jenis pekerjaan di luar pertanian, mengakibatkan berubahnya struktur ketenagakerjaan di tingkat desa? Dengan menggunakan metode penelitian arsip daerah dan "oral history" diusahakan dapat menjawab beberapa pertanyaan tersebut di atas.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN

Desa Semin yang terletak kurang lebih 23 km dari ibukota Kabupaten Gunungkidul dan merupakan ibukota kecamatan Semin, mempunyai batas-batas wilayah: di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Bulurejo, di sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Pundungsari, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ponjong, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tukluk.

Daerah ini merupakan daerah transit yang menghubungkan Klaten Wonosari dan daerah-daerah lainnya. Ke arah utara yakni ke Sukoharjo sepanjang 30 km dilengkapi dengan sarana jalan beraspal, ke arah timur yakni Wonosari (30 km), Karang Mojo (16 km), dan Ngawen (7 km) juga dilengkapi dengan sarana jalan beraspal. Berdasarkan letak kemiringannya, daerah Semin termasuk dalam kategori klas kemiringan di atas 15 persen sampai 50 persen dan terletak di ketinggian 200 m - 700 m di atas permukaan air laut.

Sebagai ibukota kecamatan, desa yang mempunyai ciri-ciri desa "semi urban" ini sudah barang tentu selain menjadi pusat kegiatan administratif juga menjadi pusat-pusat kemajuan. Berbagai fasilitas pelayanan dan jasa seperti pasar, pasar hewan, kios dan warung-warung, Balai serbaguna, terminal, Puskesmas, KUD, BRI, Kantor Pos, dan sarana pendidikan terkonsentrasikan di bagian utara desa, yakni di wilayah Padukuhan Semin, Tukluk, dan Jetis. Luas wilayah desa Semin adalah 1202,1085 Ha dari wilayah Kecamatan Semin yang 7842,0975 Ha atau 15,52 persen dari seluruh wilayah kecamatan. Adapun perbandingan distribusi

penggunaan tanah di desa Semin dengan kecamatan Semin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Tanah di Desa Semin dan Kec. Semin

Jenis	Ds. Semin		Kec. Semin	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Sawah	268,79	22,35	1309,1010	17
Tegal	596,12	49,58	4232,3290	54
Pekarangan	282,0965	23,46	1996,0115	25,45
Lain-lain	55,102	4,68	304,656	3,55

Sumber: Diolah dari data Monografi Desa dan Monografi Kecamatan Semin

Catatan: Perincian ini sudah termasuk tanah Kas Desa, tanah Pengareng-areng, tanah Pekulen, dan tanah negara.

Menurut catatan terakhir (1987) jumlah penduduk desa Semin adalah 9347 jiwa dengan jumlah KK 1797. Bila angka ini diperhitungkan dengan luas wilayah maka akan diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata 777/Km². Berdasarkan patokan Departemen Pertanian yang memberikan angka ideal untuk daerah pertanian tanah kering dan perladangan 25, 40, sampai 50 jiwa per Km², jelas desa Semin mempunyai kepadatan penduduk yang tergolong sangat padat.

Mata pencarian pokok penduduk desa ini adalah bertani (3328 orang). Selebihnya memasuki berbagai sektor pekerjaan lain seperti buruh bangunan 60 orang, buruh industri 63 orang, pedagang dan pengusaha 68, tukang batu 74 orang, tukang kayu 148 orang, tukang cukur 3 orang, jasa angkutan 11 orang, reparasi (sepeda, motor, radio, dan jam) 6 orang, dan 66 orang sebagai pekerja formal (pegawai negeri, ABRI, Pamong desa) dan pensiunan.

Gambaran mengenai tingkat pendidikan penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Semin yang berusia 10
tahun ke atas, 1986/87

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tidak sekolah/3B	647	15
Tidak tamat SD	2697	62
Tamat SD	174	4
Tidak tamat SLP	409	9
Tamat SLP	249	6
Tidak Tamat SLA	109	2,5
Tamat SLA	64	1
Tidak Tamat PT/AK	6	0,5
Jumlah	4359	100

Sumber: Monografi Desa

Dengan menggunakan ukuran tingkat pendidikan yang dikembangkan oleh Sajogyo (1983:165) yakni untuk suatu daerah yang tergolong memiliki tingkat pendidikan tinggi harus mencapai angka tingkat pendidikan SD di atas rata-rata 60 persen ke atas dari seluruh jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk desa termasuk tinggi.

Melihat keadaan tanah di desa Semin yang pada umumnya tandus (data di tingkat kecamatan menunjukkan: dari luas wilayah 8.090 Ha, 5.582,10 Ha berupa tanah kritis atau 69 persen berupa tanah kritis), serta terbatasnya prasarana produksi pertanian yang berupa jaringan irigasi yang sempurna, dapat dikenali cara bertani yang umum berlaku adalah pola bertegal dan pertanian tanah kering dengan sistim tumpangsari. Sistim tumpangsari ini yang merupakan cara bercocok tanam secara campuran antara padi gogo, jagung, cantel, kedelai, dan ketela pohon yang ditanam pada tempat dan waktu yang sama, agaknya dimaksudkan agar resiko kegagalan panen dapat diperkecil. Dari sistim ini pula dapat diketahui golongan petani cukup dengan golongan petani kurang mampu dengan melihat lokasi tanam. Pada umumnya petani yang kurang mampu menanam padi gogo, jagung, dan ketela pohon di sekitar pekarangan, sedangkan petani yang mampu menanam ketiga jenis tanaman itu di tegalan atau di sawah dan pekarangannya lebih banyak ditanami tanaman keras. Rata-rata produksi dan jumlah produksi pertanian di tingkat kecamatan setelah adanya introduksi teknologi pertanian dapat dilihat dalam tabel ini:

Tabel 3. Produksi Pertanian Kec.
Semin, 1982/83

Jenis	Rata-rat Prod. (kwt)	Jumlah Prod. (kwt)
Padi sawah	35	91700
Padi gogo	17,5	987,5
Jagung	8	11184
Ketela	50	228000
Ketela rambat	15	1590
Kacang tanah	15	14505
Kacang hijau	5	105
Kedelai	7	23569
Cantel	8	5776

Sumber: Monografi Kecamatan Semin

Jenis Tanaman	1982/83		1983	
	Rata-rata (Kw/Ha)	Total (Kw)	Rata-rata (Kw/Ha)	Total (Kw)
Padi Gogo non VUTW	81	21.976	-	-
Padi Gogo VUTW	10	10.060	-	-
Padi sawah VUTW			24	1112
Padi sawah non VUTW			11	22
Ketela	25	10.750	20	340
Jagung	5	200	-	-
Kacang tanah	11	110	9	97
Kedelai	7	105	6	66
Sorgum	7	35	-	-

SUMBER: Arsip Desa Semin (Tulisan tangan)

Tabel 8a. Produksi pada Musim Tanam 1983/84
dan 1984 di Desa Semin

Jenis Tahaman	1983/84		1984	
	Rata-rata (Kw/Ha)	Total (Kw)	Rata-rata (Kw/Ha)	Total (Kw)
Padi gogo non VUTW	72	19.872	-	-
Padi gogo VUTW	10	1.160	-	-
Padi sawah VUTW	68	1.360	61,5	21.129
Padi sawah non VUTW	-	-	28	1.456
Ketela	30	330	-	-
Kacang tanah	60	1.500	80	6.640
Jagung	11	176	-	-
Kedelai	7	14	12	300
Sorgum	-	-	-	-

Distribusi pemilikan dan penguasaan tanah di tingkat desa pada tahun-tahun enam puluhan yang semula diharapkan dapat diperoleh ternyata (sementara) sulit ditemukan. Namun demikian -- menurut dugaan -- dari data yang tersedia tahun 1987 di tingkat desa (tabel 4a) tidak jauh berbeda dengan data di tingkat kabupaten tahun 1968 (tabel 4b), yang semuanya memberikan gambaran adanya ketimpangan dalam pola pemilikan tanah.

Tabel 4a. Distribusi pemilikan tanah di desa Semin, 1987

Dukuh	0-0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	0,75-1,00	1,00-ke atas
Semin	99	82	3	7	5
Tukluk	35	64	4	6	2
Papringan	37	42	3	2	3
Jirak	28	20	2	1	2
Kracaan	40	34	2	2	4
Kepek	39	83	12	13	12
Munggur	37	41	3	1	2
Ngijo	50	98	8	7	10
Tlepok	30	53	2	1	2
Karangpoh	61	78	16	9	13
Tegalsari	57	87	12	10	15
Pilangbroto	85	120	29	11	10
Dilem	36	47	3	4	7
Mandesan	67	90	7	6	13
Ngepoh	36	60	4	4	4
Pucungmalang	38	63	3	4	5
Parangan	68	70	6	6	6
Jumlah	843 (37,10 %)	1132 (49,80 %)	89 (3,90 %)	94 (4,15 %)	115 (5,05 %)

Sumber: Monografi Desa

Tabel 4b. Distribusi Pemilikan Tanah
di Kabupaten Gunungkidul, 1968

Golongan Luas (Ha)	Jumlah	%
Kurang dari 0,24	13.760	13,79
0,25 - 0,50	29.166	29,23
0,50 - 0,75	19.308	19,35
0,75 - 01	12.602	12,63
1 - 1,25	9.839	9,86
1,25 - 1,50	7.025	7,04
1,50 - 1,75	4.570	4,58
1,75 - 2	2.495	2,50
2 Ha ke atas	1.028	1,03
Jumlah	99.782	100

Sumber: Data Statistik Kantor Dinas Biro Pusat Statistik
Kabupaten Gunungkidul, 1968

Distribusi pemilikan tanah yang tidak merata sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut, di tingkat desa, akan ditemui 87,80 persen dan di tingkat kabupaten 62,37 persen hidup dalam "kekurangan" apabila tolok ukur mengikuti standart hidup kecukupan dari Masri Singarimbun dan D,H, Penny (1976: 65) yang ditetapkan 0,70 Ha tanah sawah dan 0,30 Ha pekarangan dengan rata-rata per keluarga terdiri dari lima jiwa.

BAB III

PERUBAHAN TATA GUNA TANAH, POLA TANAM DAN TEKNOLOGI PERTANIAN

1. Perubahan Tata Guna Tanah

Struktur tata guna tanah di daerah lahan kering¹ akan lebih dapat dipahami apabila dibicarakan juga bagaimana proses yang mendasari munculnya pemukiman baru dan faktor yang mendorong manusia menempati daerah itu dan kemudian memanfaatkannya. Pada perkembangan lebih lanjut, pola penggunaan tanah di daerah lahan kering akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam dan kecenderungan umum pola tanah serta jenis-jenis teknologi pertanian yang dapat dikembangkan di daerah itu.

Dari hasil studi Palte yang membahas mengenai asal usul dan perkembangan pertanian lahan kering di Jawa, sekurang-kurangnya dapat diketahui gambaran proses pemukiman di daerah lahan kering dengan menekankan pertambahan penduduk yang semakin pesat dari tahun ke tahun selama abad 19 itu sebagai faktor penyebab utamanya.² Pada tahun 1850-an jumlah penduduk di Jawa yang sebagian besar sudah terkonsentrasikan di daerah-daerah dataran rendah sudah mencapai hampir 12,5 juta jiwa. Menjelang akhir paruh ke dua abad 19 jumlah itu sudah semakin meningkat dua kali lipat. Bertambahnya jumlah penduduk yang demikian pesat itu tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti umpamanya semakin menciutnya sumber-sumber ekonomi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan berbagai jenis pekerjaan yang tersedia. Selain itu juga meningkatnya jumlah penduduk ini membawa akibat yang cukup serius di sektor pertanian yakni andalan

penghidupan utama yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian semakin terpecah-pecah dan mengecil akibat terbagi-baginya tanah melalui proses pewarisan tradisional yang lazim berlaku di daerah pedesaan. Dari berbagai masalah yang timbul itu akhirnya membentuk suatu kondisi yang kurang menguntungkan bagi sebagian besar petani. Jalan satu-satunya yang dipandang perlu oleh para petani pada masa itu adalah mencari daerah-daerah baru yang diharapkan dapat menopang kehidupan mereka. Untuk mengatasi gelombang pencari lahan-lahan baru, pemerintah kolonial berusaha mengarahkan mereka ke daerah-daerah kosong di dataran tinggi dengan sambil mengendalikan mereka. Usaha pengendalian itu dilakukan dengan cara menyewakan daerah-daerah pegunungan dataran tinggi kepada pemilik modal untuk dimanfaatkan sebagai penanaman tanaman komersial. Namun demikian, pada masa pendudukan Jepang sampai dengan Indonesia merdeka, hunian-hunian liar terutama di sekitar daerah perkebunan sudah tidak dapat terbandung lagi karena situasi politik dan pertimbangan sosial keberadaan mereka tidak diganggu gugat.³

Selain faktor kependudukan yang mengakibatkan munculnya hunian-hunian baru di daerah lahan kering -- sebagaimana ditunjukkan Palte -- juga faktor-faktor tekanan politik kerajaan pada masa lalu. Umpamanya, munculnya desa-desa di daerah Gunung Kidul diduga mempunyai kaitan erat dengan kebijaksanaan politik kerajaan Mataram mengenai pembagian kekuasaan yang kemudian melahirkan orang-orang yang tidak puas. Dari kelompok inilah kemudian mereka menyingkir menjauhi pusat-pusat kerajaan dan membentuk koloni-koloni baru bersama pengikutnya.⁴

Sebagaimana dinyatakan pada awal tulisan ini bahwa pemanfaatan lahan kering akan sangat dipengaruhi oleh diantaranya lingkungan alam, kecenderungan umum pola tanam yang cocok dengan kondisi alam tersebut, dan jenis-jenis teknologi pertanian yang dapat dikembangkan di daerah itu. Di daerah Gunungkidul -- yang seterusnya banyak dijadikan obyek kajian dalam tulisan ini -- sebelum masuknya program-program pembangunan dan belum terbukanya kesempatan-kesempatan ekonomis di luar sektor pertanian, keadaan kesejahteraan penduduknya sungguh sangat memprihatinkan. Terutama pada masa-masa paceklik seperti misalnya yang pernah terjadi pada tahun 1960-an akibat kemarau panjang dan serangan hama tikus, keadaan rawan pangan dan penyakit terutama diare sudah sedemikian parahnya. Keadaan rawan pangan itu sebagian dapat tercermin dari keterangan seorang informan (pamong desa) dari sebuah desa di wilayah timur kabupaten Gunungkidul yang menyatakan bahwa harga satu pikul gaplek hampir setara dengan harga satu ekor sapi. Kemiskinan, kondisi tanah pertanian yang masih sangat tergantung pada melimpah tidaknya air hujan, dan jauhnya kesempatan penduduk untuk ikut masuk dan menikmati pelayanan-pelayanan pembangunan pada masa Orde Lama itu, dalam beberapa hal telah membatasi penduduk dalam usahanya memanfaatkan tanah-tanah pertanian semaksimal mungkin. Akibatnya adalah banyak tanah-tanah yang diterlantarkan.⁵ Sementara itu program penghijauan belum masuk ke daerah Gunungkidul. Demikian juga teknologi pertanian modern masih sangat terbatas sekali. Prinsip "dahulukan selamat" tentu saja menjadi bagian pokok dalam kehidupan penduduk setempat. Pemanfaatan tegalan, pekarangan, dan kebun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

prinsip tersebut karena peluang-peluang lain di sektor pertanian dan di luar sektor pertanian yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk masih jauh dari harapan. Keadaan semacam itu secara tidak langsung akan memberikan ciri yang khas atau karakteristik struktur tata guna tanah yang berbeda dengan daerah lahan basah maupun daerah perkebunan di daerah dataran tinggi.

Dari Tabel 1 berikut ini akan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi dalam tata guna tanah sebelum adanya introduksi program-program pembangunan yang intensif dan sesudah adanya perogram-program pembangunan yang lebih intensif sejak tahun 1969-an yakni sejak masa Pelita pertama. Tentu saja masuknya program-program pembangunan itu bukanlah merupakan faktor-faktor utama karena faktor-faktor lainnya seperti misalnya berkembangnya sistem penguasaan tanah dan bertambahnya jumlah penduduk ikut memainkan penting di dalamnya.

Tabel 1. Struktur Tata Guna Tanah di Kabupaten Gunungkidul

Jenis Tanah	1968		1983	
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
Sawah Irigasi	819	0,55	2.318,20	1,56
Sawah Tadah Hujan	6.295	4,24	4.794,80	3,23
Tegal	95,138	64,05	92.833	62,50
Pekarangan	23.289	15,68	25.598	17,23
Hutan	12.774	8,60	12.774	8,60
Lain-lain	10.221	6,88	10.221	6,88
Jumlah	148.536	100	148.536	100

Sumber: Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul tahun 1983.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 1968 jumlah total luas sawah irigasi baru 819 Ha atau 0,55 prosen dari seluruh luas tanah yang dimanfaatkan, meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 1983. Perubahan yang cukup mencolok ini antara lain disebabkan adanya pembangunan Chek Dam yang mulai dirintis tahun 1983 yang tersebar di kecamatan Nglipar, Semin, Karangmojo, Patuk, dan Ngawen. Selain itu juga adanya pemasangan oncoran sumur pompa diesel sejak tahun 1975 yang mampu mengairi tanah seluas 904,20 Ha.⁶

Akibat mening-

katnya luas sawah pengairan ini adalah semakin mengecilnya luas sawah tadah hujan dari 6295 Ha tahun 1968 menjadi 4794,80 Ha pada tahun 1983. Pada kolom "tegal" mengalami penurunan dari 95138 Ha menjadi 92833 dan begitu sebaliknya pada kolom "pekarangan" menunjukkan kenaikan dari 23289 menjadi 25598 Ha. Hal ini kemungkinan besar adalah disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk. Dengan sendirinya peningkatan jumlah penduduk itu menuntut adanya pemukiman-pemukiman baru yang sebagian besar dilakukan dengan cara mengubah tanah tegalan yang kurang produktif menjadi pemukiman-pemukiman baru.

Karena perbedaan latar belakang sejarah, struktur tata guna tanah lahan kering di daerah-daerah bekas kerajaan dengan daerah-daerah partikelir yang sebagian besar merupakan daerah perkebunan, ^{juga berbeda.} Ambil contoh misalnya di suatu distrik (sekarang kecamatan) Segalaherang yang dulunya merupakan daerah partikelir Pamanukan en Tjiasem Landen (P en T) milik Peter W. Hofland bersaudara, pemanfaatan tanah untuk persawahan dan pemukiman



serta tegalan relatif lebih kecil dibanding dengan pemanfaatan untuk lahan perkebunan dan pemeliharaan hutan (Lihat Tabel 2). Luas daerah untuk pemukiman yang relatif kecil hanya 6 prosen dari seluruh luas tanah di kecamatan SegalaHerang (23.832 Ha) kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya tanah yang dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman perkebunan yang secara ekonomis mempunyai nilai lebih tinggi dibanding dengan tanaman lainnya. Kenyataan itu bukan berarti penduduk di daerah tersebut sangat jarang tetapi lebih dimungkinkan adanya pemusatan pemukiman di daerah-daerah pusat pengembangan dan pusat perekonomian. Dari laporan seorang Residen Krawang, Povelier, menyebutkan bahwa jumlah penduduk di distrik SegalaHerang tahun 1929 sebanyak 82.657 jiwa.⁷ Kemudian jumlah itu meningkat menjadi 102.162 jiwa pada tahun 1987.⁸

Tabel 2. Struktur Tata Guna Tanah di daerah Dataran tinggi SegalaHerang

Uraian	Luas (Ha)	Prosentase
Sawah irigasi	3.169	13,30
Sawah Tadah hujan	2.213	9,30
Tegal	591	2,50
Kebun campuran	3.944	16,50
Hutan	4.490	18,80
Perkebunan PTP/HGU	7.181	30,10
Pemukiman	1.424	6,00
Lain-lain	824	3,50
Jumlah	23.836	100

Sumber: Bappeda Dati II Subang, Subang Dalam Angka. Subang, 1988, hlm. 22-23.

2. Pola Tanam

Melihat tanah pertanian lahan kering seperti misalnya di Kabupaten Gunungkidul yang lebih separuhnya berupa tanah kritis, serta terbatasnya prasarana produksi pertanian seperti misalnya berupa jaringan irigasi yang sempurna, dapat dikenali cara bertani yang lazim dilakukan penduduk setempat adalah pola bertegal dan pertanian tanah kering dengan sistem tumpangsari. Sistem tumpangsari ini yang merupakan cara bercocok tanam secara campuran antara padi gogo, jagung, cantel, kedelai dan ketela pohon yang ditanam pada tempat dan waktu yang sama, agaknya dimaksudkan agar resiko kegagalan panen dapat diperkecil. Dengan adanya sistem tumpangsari ini dapat pula diketahui golongan petani cukup dengan golongan petani kurang mampu dengan cara melihat lokasi tanam. Pada umumnya petani yang kurang mampu menanam padi gogo, jagung, maupun ketela pohon di sekitar pekarangan mereka, sedangkan petani yang cukup mampu akan menanam ketiga jenis tanaman tersebut di tegalan atau sawah dan pekarangan mereka akan lebih banyak ditanami tanaman keras atau tanaman tahunan.

Banyak pandangan mengenai masalah pertimbangan komersial dalam hal diversifikasi^{fi} tanaman yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Jawa maupun di Asia Tenggara ini. Scott, umpamanya, lebih cenderung melihat bahwa usaha diversifikasi tanaman yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Asia Tenggara bukanlah semata-mata lebih didasarkan pada pertimbangan komersial, tetapi pada dasarnya lebih merupakan suatu

strategi petani agar perolehan bahan-bahan makanan dapat terjamin sepanjang waktu dengan menanam beberapa jenis tanaman yang hasilnya mantap meskipun hasilnya tidak terlalu banyak. Atau dengan kata lain prinsip "dahulukan selamat" lebih banyak mewarnai pertimbangan para petani daripada pertimbangan-pertimbangan komersial.⁹

Sejalan dengan pikiran Scott ini adalah Otto Soemarwoto. Ia lebih melihat bahwa usaha diversifikasi tanaman yang dilakukan oleh petani adalah merupakan ciri khusus dari usaha pertanian subsisten -- suatu usaha pertanian yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan petani itu sendiri.¹⁰

Dengan tanpa melihat tingkat produktivitas berbagai jenis tanaman yang diproduksi oleh para petani, pada tingkat keluarga, usaha pertanian subsisten ini dilihat oleh Chayanov sebagai satu unit produksi dan juga sebagai unit konsumsi.¹¹

Berbeda dengan jalan pikiran tersebut di atas, peneliti lain menemukan bahwa usaha diversifikasi tanaman yang dilakukan oleh para petani mempunyai pertimbangan komersial untung-rugi karena dalam menanam tanaman yang berlainan jenis tetapi kedudukannya sama mereka lebih cenderung mengutamakan tanaman jenis tertentu yang hasilnya lebih produktif dan menggunakan alat-alat produksi tertentu untuk lebih mengalokasikan sumber produksi semaksimal mungkin.¹²

Sistem ekologi bercocok tanam semacam itu selama bertahun-tahun tidak akan pernah mengalami perubahan yang cukup berarti -- selama belum ada perubahan drastis umpamanya dengan tersedianya air yang melimpah-ruah sehingga menarik petani untuk memproduksi satu jenis tanaman yang dapat diandalkan mampu

menunjang kesejahteraan keluarganya -- kecuali pada jenis-jenis tanaman yang diusahakan dan alat-alat produksi pertanian.

3. Teknologi

Gelombang "Revolusi Hijau" yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an ternyata tidak pilih kasih. Artinya, ia tidak saja melanda daerah-daerah yang relatif subur seperti daerah persawahan tetapi juga melanda daerah-daerah lahan kering yang secara potensial miskin. Begitu juga umpamanya di kabupaten Gunungkidul yang sebagian besar tanahnya berupa lahan kering mendapat terpaan gelombang "Revolusi Hijau" melalui program-program pembangunan yang masuk di daerah itu. Terdorong oleh masalah yang sebenarnya dilematis yakni apabila pembangunan pertanian dilaksanakan dengan titik penekanan pada peningkatan produksi pertanian, kerusakan tanah yang semakin parah akibat erosi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga sebaliknya apabila pembangunan pertanian ditekankan pada penanggulangan erosi berarti akan mengundang kelaparan, maka pembangunan pedesaan di daerah ini dilakukan secara seimbang dan serasi. Di satu pihak, telah diusahakan peningkatan potensi sosial dengan membentuk lembaga-lembaga baru seperti misalnya lembaga Kontak Tani, Wilayah Unit Desa yang dilengkapi dengan catur sarananya, organisasi Petani Maju, Kelompok Tani Wanita, dan di bidang teknis telah diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan dengan meningkatkan pemakaian pupuk buatan, obat-obatan pemberantas hama, pemakaian bibit padi unggul seperti misalnya jenis PB 5, PB 8, dan IR 36 melalui program intensifikasi khusus, perluasan berbagai

Jenis tanaman lain seperti introduksi bibit unggul jagung jenis Arjuna, bibit kedelai varietas Orba atau Lokon, serta pengembangan irigasi melalui pembuatan Chek-Dam dan oncoran sumur pompa diesel. Di lain pihak, sejak tahun 1970-an sudah dirintis usaha pengendalian erosi melalui program penghijauan.

Dengan adanya intervensi teknologi pertanian melalui program-program pembangunan pedesaan seperti tersebut di atas, selain mampu merubah kebiasaan petani dalam menggunakan alat-alat produksi dan sarana produksi lainnya yang lebih "modern" juga hasil-hasil produksi pertanian mengalami perubahan yang cukup berarti. Pengenalan padi bibit unggul yang mempunyai batang pendek dan mudah rontok, umpamanya, telah menggeser penggunaan alat produksi pertanian tradisional yaitu ani-ani dengan digunakannya sabit yang lebih praktis dan tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja. Berkembangnya sarana irigasi dengan dibangunnya Chek-Dam dan pemasangan oncoran sumur pompa diesel di beberapa tempat di daerah Gunungkidul selain mampu meningkatkan jumlah produksi juga membawa akibat berubahnya sebagian sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi. Begitu juga masuknya alat penggilingan padi modern (huller) telah menggeser pemakaian alat-alat tradisional seperti alat penumbuk padi (alu dan lesung). Gambaran kenaikan produksi pertanian selama 15 tahun (1968-1983) dapat dilihat dalam Tabel berikut ini (Tabel 3) .

Tabel 3. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Gunungkidul
Selama 15 Tahun

Jenis Tanaman	1968		1973	
	Jumlah Pro- duksi (t ⁿ)	Rata-rata Produksi per Ha (kuintal)	Jumlah Pro- duksi (ton)	Rata-rata Produksi per Ha (kuintal)
Padi sawah	11.481	12	24.457	35,38
Padi gogo	14.962	9,30	86.411	9,03
Jagung	27.962	8,65	21.500	12,24
Ubikayu	439.169	85,29	379.617	72,15
Ubi jalar	658	27,77	625	44,08
Kedelai	22.297	5,33	21.717	6,22
Kacang tanah	18.768	7,58	19.464	5,75
Kacang hijau	204	2,40	134	1,56

Lanjutan

	1978		1983	
	27.786	46,25	33.422	50,51
	87.650	21,23	159.232	36,86
	60.907	13,33	97.224	14,89
	500.523	99,45	594.192	112,46
	771	44,08	910	55,47
	27.539	6,60	35.669	7,12
	27.079	8,21	32.848	8,91
	303	1,49	314	2,13

SUMBER: Diolah dari Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, 1968; Buku Laporan Pelaksanaan Pelita I, Pelita II, dan Pelita III Kabupaten Gunungkidul.

dari (1) tanah garapan yang disediakan untuk penduduk desa baik itu berupa tanah persawahan maupun tegalan. Tanah yang disediakan untuk penduduk miskin ini sering disebut sebagai tanah soksara; (2) Tanah jabatan atau lungguh atau bengkok, yaitu sebagai imbalan haji untuk pamong desa; (3) tanah pengarem-arem, yaitu tanah imbalan untuk pamong desa yang sudah pensiun; (4) tanah untuk kepentingan umum yaitu dapat berupa makam, tanah pengembalaan dan lain-lain; dan (5) tanah kas desa, yaitu tanah yang disediakan untuk pembiayaan desa. Hak penguasaan atau pertuanan tanah komunal ini dilakukan oleh kepala desa dengan persetujuan rapat desa. Selain itu masih ada tanah komunal yang diberikan kepada penduduk desa dengan hak pakai yang diatur secara bergilir. Hak pakai atas tanah ini dapat diwariskan dan dengan kuajiban yang sama seperti pendahulunya yakni membayar pajak, ronda malam, dan pekerjaan-pekerjaan desa lainnya. Di daerah Gunungkidul tanah jenis ini disebut tanah pekulen yang dapat berupa sawah, tegal, maupun pekarangan.

Proses perubahan kepemilikan dan penguasaan atau pelepasan hak atas tanah kepada orang lain secara tetap, dapat diakibatkan karena waris atau hibah dan jual beli. Sebagaimana tradisi pewarisan yang umum berlaku di Jawa, proses ini dapat menimbulkan fragmentasi tanah yang kian lama kian mengecil. Begitu juga proses jual beli akan mengakibatkan munculnya akumulasi tanah dan mendesak pemilik tanah yang semakin mengecil menjadi barisan petani tuna tanah. Data mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah melalui pewarisan dan jual beli ini di Gunungkidul tidak

BAB IV

PERUBAHAN STRUKTURAL DAN PELUANG KERJA

1. Pola Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Di Jawa, hampir tidak dapat dibedakan secara jelas pola umum sistem pemilikan dan penguasaan tanah di daerah dataran rendah yang lebih banyak didominasi sistem pertanian tanah basah (sawah) dengan di daerah lahan kering yang banyak didominasi sistem pertanian perladangan (tegal). Lembaga pemilikan tanah di kedua daerah tersebut juga terdapat hak pemilikan tanah perorangan dan hak pemilikan tanah komunal atau tanah desa. Begitu juga proses bekerjanya sistem penguasaan tanah menunjukkan gejala yang sama, yakni menyangkut masalah pemilikan, penggarapan, dan pembagian hasil.

Seperti yang telah disinggung di atas, lembaga pemilikan tanah di pedesaan dibedakan menjadi dua bentuk pemilikan, yakni pemilikan perorangan atau individual dan pemilikan komunal atau tanah desa.¹³ Pemilikan tanah perorangan tercermin dalam bentuk tanah yasan. Proses pemilikan tanah ini kemungkinan karena pembelian, pewarisan, dan pembukaan tanah baru. Dari arti kata yasan atau yoso yang dapat diterjemahkan "membuat" atau "mencari" sebenarnya pemilikan tanah ini lebih dekat dengan pengertian "membuka tanah baru atau membuka hutan". Artinya pemilikan tanah yasan lebih banyak diperoleh melalui pembukaan tanah baru dari pada melalui pembelian atau pewarisan. Di atas tanah yasan ini pemiliknya mempunyai hak sepenuhnya untuk menguasai dan mengusahakan produksi tanaman untuk kepentingan keluarganya sendiri. Tanah komunal atau tanah desa ini terdiri dari

diperoleh. Sebagai perbandingan saja antara daerah subur dengan daerah yang kurang subur, jumlah total yang melakukan pembelian dan mewarisan tanah di kedua daerah tersebut hampir sama besarnya, yakni 18 % dan 30 % dibanding 16 % dan 34 %.¹⁴

Selain pelepasan hak atas tanah secara tetap juga terdapat proses pelepasan hak penguasaan atas tanah yang sifatnya sementara, yakni melalui sistem sewa menyewa dan sakap menyakap. Di daerah yang kurang subur seperti di daerah Gunungkidul, sistem sewa menyewa yang umum dilakukan adalah dengan cara sewa tahunan atau sering disebut oyodan. Hak penyewa adalah menguasai tanah sewaan dan mengusahakannya selama kurun waktu yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik tanah, sedangkan kewajiban penyewa adalah memberikan sejumlah uang kepada pemilik dan setelah batas waktu sewa menyewa selesai, pemilik tanah tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa atau uang bunga. Namun tak jarang pula, dengan cara-cara tertentu, penyewa dapat menjerat pemilik tanah yang kemudian membeli tanah sewaan tersebut. Perubahan jumlah penyewa di daerah Gunungkidul akan dibicarakan bersama-sama dalam pembicaraan mengenai hubungan kerja yang meliputi sistem sakap menyakap, maro, mertelu, tebasan, upahan pada bagian berikutnya.

Gambaran perubahan pemilikan dan penguasaan tanah di kabupaten Gunungkidul selama lima belas tahun yakni dari tahun 1968 sampai 1983 dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Struktur Penguasaan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kurang 0,25	9,878	9,73	28.045	21,27
0,26 - 0,50	12.020	11,84	37.156	28,18
0,51 - 0,75	21.604	21,28	23.153	17,56
0,76 - 1,00	24.050	23,69	18.080	13,72
1.00 ke atas	34.771	34,25	15.822	23,63

Tabel 5. Struktur Pemilikan Tanah di Kabupaten Gunungkidul

Golongan Luas (Ha)	1968		1983	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kurang 0,25	13.760	13,79	21.149	21,97
0,26 - 0,50	29.166	29,23	32.532	33,80
0,51 - 0,75	19.308	19,35	19.389	20,16
0,76 - 1,00	12.602	12,63	7.829	8,13
1,00 ke atas	24.957	25,00	15.337	15,94

SUMBER: Data Statistik Kantor Dinas Agraria Kabupaten Gunungkidul, 1983

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan pola penguasaan tanah yang semula (1968) jumlah orang yang mengusahakan tanah di bawah 0,50 Ha baru 21.898 orang atau 21,57 persen, pada tahun 1983 meningkat menjadi 65.201 orang atau 49,45 persen. Sementara itu jumlah orang yang mengusai tanah lebih dari 0,50 Ha mengalami penurunan dari 78,43 persen menjadi 50,55 persen. Demikian pula pola pemilikan tanah dari 43,02 persen

dari 43,02 prosen yang memiliki tanah kurang dari 0,50 Ha pada tahun 1968 meningkat menjadi 55,77 prosen pada tahun 1983, sedangkan yang memiliki tanah diatas 0,50 mengalami penurunan dari 56,98 prosen menjadi 44,23 prosen pada tahun 1983 (Tabel 5).

Pola penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang yang memang sudah terjadi sejak sebelum Pelita I ini selain dapat dijelaskan melalui tilikan sistem waris atau hibah, sistem sewa menyewa, sistim sakap menyakap, dan sistem jual beli, juga dapat dijelaskan melalui perspektif keberadaan lembaga kekerabatan tradisional atau sering disebut trah yang sampai sekarang masih dapat dilihat di beberapa desa di Gunungkidul. Beberapa desa di Gunungkidul menyebut kelompok kekerabatan ini sebagai "kelompok kasepuhan". Kelompok trah atau kelompok kasepuhan merupakan anak keturunan dari penguasa desa atau demang di desa yang mereka tempati. Bahkan ada yang lebih jauh lagi secara genealogis menghubungkan dirinya dengan pendiri desa atau cikal-bakal. Umumnya mereka ini adalah pemilik-pemilik tanah yang sangat luas dan secara kualitatif tanahnya lebih subur dibanding dengan penduduk kebanyakan. Selain itu juga menguasai sumber-sumber ekonomis di desanya. Dengan demikian, tersedianya modal mereka mampu dengan leluasa menguasai banyak tanah baik itu dengan cara bagi hasil di atas tanah penduduk yang tidak mampu mengolahnya sendiri maupun dengan cara yang lain.

2. Peluang Kerja Pertanian

Hubungan kerja di pedesaan dapat terwujud seperti misalnya dalam sistem bagi hasil atau penyakapan dan lembaga baru seperti tebasan serta hubungan-hubungan kerja lain seperti borongan, upahan, yang semuanya melibatkan pemilik modal dan buruh.

Dalam Tabel 6 berikut ini akan ditunjukkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sisten penyakapan dan sewa tahunan.

Tabel 6. Distribusi Petani Penyakap dan Jumlah Penyewa Tahunan

Tahun	Golongan Petani (Ha)	Jumlah	Jumlah Penyakap	%	Maro	%
1968	Buruh tani	1.739	1.496	79,00	140	8,05
	kurang 0,25	13.760	8.669	63,00	2.000	14,54
	0,26 - 0,50	29.166	12.541	43,00	6.571	22,53
	0,51 - 0,75	19.308	4.055	21,00	3.536	18,31
1983	Buruh tani	24.888	6.618	26,59	545	2,19
	kurang 0,25	21.149	5.922	28,00	763	3,61
	0,26 - 0,50	32.532	7.428	23,00	5.832	17,93
	0,51 - 0,75	19.398	3.298	17,00	2.522	13,00

Lanjutan

Mertelu	%	Sewa	%
1.246	64,33	110	6,33
5.890	42,81	779	5,66
4.839	16,60	1.131	3,88
59	0,31	460	2,38
5.316	21,36	757	3,04
4.653	22	82	0,39
891	2,74	758	2,33
630	3,25	145	0,75

SUMBER: Data Statistik Kantor Dinas Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah buruh tani pada tahun 1968 sebanyak 1.739 orang, 79 prosen diantaranya terlibat dalam sistem penyakapan, 8,05 terlibat dalam sistem maro, 64,33 prosen terlibat dalam sistem mertelu, dan 6,33 terlibat dalam sistem sewa. Lima belas tahun kemudian komposisi tersebut mengalami perubahan yang sangat mencolok: Buruh tani meningkat menjadi 24.888 orang, sedangkan yang terserap dalam hubungan kerja penyakapan hanya 26,59 prosen (mengalami penurunan 50 % lebih). Ada dugaan kuat bahwa meningkatnya jumlah buruh tani tersebut karena semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia. Hal itu dapat terlihat dalam kolom "Maro", "mertelu", dan "sewa" yang tidak begitu banyak melibatkan buruh tani tersebut. Dari kolom-kolom tersebut juga dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang lazim berlaku di pedesaan Gunungkidul adalah sistem mertelu dan maro, sedangkan sistem sewa kurang begitu umum di pedesaan Gunungkidul. Justru sistem sewa ini mengalami penurunan dari 2480 pada tahun 1968 menjadi 1742 padahal jumlah petani dan buruh tani mengalami peningkatan dua kali lipat. Secara umum dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melemahnya sistem penyakapan di daerah Gunungkidul ini dibarengi pula dengan semakin menciutnya sumber-sumber kehidupan petani kecil.

Bertambahnya jumlah buruh tani sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6 tersebut yang tidak diimbangi dengan perluasan areal pertanian dan kesempatan kesempatan kerja di luar sektor pertanian mengakibatkan semakin memberatkan tanggung jawab sosial petani pemilik tanah. Sedapat mungkin para petani

pemilik tanah ini berusaha ke luar dari lingkaran hubungan patron-client. Jalan yang dianggapnya paling mudah oleh para petani pemilik tanah ini diantaranya adalah menjual padinya di sawah kepada penebas. Munculnya lembaga tebasan ini telah merubah hubungan kerja dari petani-penderep menjadi penebas-penderep. Banyak peneliti yang menganggap bahwa sistem tebasan telah mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja. Collier, umpamanya, menganggap bahwa munculnya sistem tebasan telah memaksa 30 sampai 35 prosen penduduk pedesaan kehilangan kesempatan kerja.¹⁵ Namun sebenarnya bukan tebasannya itu sendiri yang mengancam penduduk pedesaan kehilangan kesempatan kerja tetapi justru penggunaan sabit sebagai pengganti ani-ani dan kombinasi usaha kerja panen dengan dukungan teknologi yang lebih maju yang menggeser tenaga kerja.¹⁶

Hubungan kerja yang lebih baru yang terjadi di beberapa desa di Gunung kidul baru-baru ini adalah hubungan kerja antara pemuda-pemuda Karang Taruna dengan petani atau dengan desa. Hubungan ini tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan antara pemilik dengan buruh upahan atau yang sejenisnya karena tidak ada perjanjian lama kerja atau pun tingkat upah yang harus dibayar oleh pemberi kerja. Umpamanya di sebuah desa di kecamatan Semin, kabupaten Gunungkidul, pemuda-pemuda Karang Taruna yang diminta membantu memanen buah Jambu mete oleh salah seorang penduduk hanya meminta pemilik pohon menyumbangkan uang seke-darnya untuk kas organisasi. Begitu juga pemuda-pemuda yang diminta oleh desa menggarap sawah desa yang bibitnya disediakan oleh desa mendapat bagian lebih banyak yakni setengah untuk

organisasi, sepertiga untuk padukuhan yang ditempati tanah desa yang digarap oleh pemuda Karang Taruna, dan selebihnya untuk desa.

3. Peluang Kerja di luar Pertanian

Perubahan budaya, terutama pada perubahan gaya hidup, setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh berkembangnya lembaga pasar, kebiasaan penduduk desa melakukan pekerjaan dan berusaha dengan cara nglaju atau bermigrasi musiman di kota. Ke dua faktor itu memungkinkan penduduk Semin berinteraksi dengan komunitas lain diluar komunitas mereka. Atau dengan kata lain kedua faktor itu memungkinkan bertemunya unsur budaya kota dengan budaya setempat lewat kontak antar individu. Selain itu pengaruh dari para pekerja musiman di kota dan para migran dari desa setempat yang tinggal di kota dan paling sedikit tiap tahun "pulang kampung", serta letak desa penelitian, telah menempatkan desa penelitian menuju pada sebuah desa semi urban. Di sisi lain, pembangunan pertanian serta pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi mempunyai andil besar dalam proses perubahan yang terjadi.

Pasar desa Semin yang terletak persis di tengah-tengah kecamatan diduga mempunyai peranan kuat dalam mendukung perekonomian penduduk desa setempat dan desa-desa sekitarnya. Melihat letaknya yang strategis, yakni di persimpangan jalan yang menghubungkan desa-desa sekitarnya dan menghubungkan daerah-daerah lain seperti Wonosari, Wonogiri, dan Klaten, menjadikan pasar desa ini sejak dahulu sudah berfungsi sebagai pusat perhubungan sejumlah komunitas yang berasal dari berbagai daerah. Meskipun pada tahun 1960-an baru terdapat sarana transportasi bermesin, yakni sebuah bus "Bagong" milik Parto, penduduk Semin, yang membuka trayek Semin-Yogyakarta. Sekalipun

pada tahun 1960-an itu, dengan angkutan bahan-bahan dan barang produksi lokal terbatas pada sepeda, kuda beban, dan sebuah bus, namun melihat jalur-jalur perhubungan desa-kota seperti itu jelas akan mempengaruhi mekanisme perekonomian penduduk setempat dalam memenuhi kebutuhan barang-barang keperluan pokok sehari-hari dan juga mempengaruhi laju kelancaran arus peredaran barang (flow of goods).

Berdagang kecil-kecilan atau bekerja nglaju di luar desa merupakan pilihan yang tepat bagi penduduk pedesaan ketika musim panen telah selesai. Kegiatan usaha dan berusaha di luar pertanian ini semakin meningkat ketika pembangunan jalur-jalur transportasi mulai dilakukan. Seorang haji yang sukses, yang menguasai perdagangan dan distribusi daging sapi di Jakarta selatan merupakan pioner yang semakin membuka kesempatan bekerja dan berusaha bagi penduduk Semin. Hampir semua warga desa yang ingin mencari pekerjaan di Jakarta pertama-tama yang dituju adalah haji tersebut. Kemudian sebelum dia dapat pekerjaan, akan ditampung di rumah haji itu. Ternyata fungsi hubungan kedaerahan atau broker menjadi kunci penting bagi terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk di desa Semin.

BAB V

KESIMPULAN

Sebagaimana umumnya daerah lahan kering, desa penelitian mempunyai potensi alam yang rendah. Sebagai gambaran, misalnya, apabila daerah penelitian tersebut dalam keadaan terisolasi sepenuhnya, maka yang dijumpai adalah produktivitas pertanian hanya mampu menunjang kehidupan penduduknya rata-rata sekitar enam bulan dalam setahunnya. Waktu enam bulan selebihnya harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk untuk mengkait rejeki baik berusaha dan bekerja di luar pertanian. Dari gambaran ini dapat dipahami bahwa terdapat kecenderungan yang kuat bagi penduduk untuk melakukan migrasi temporer secara besar-besaran apabila musim panen telah usai.

Perubahan dan perkembangan masyarakat pedesaan di daerah Gunung kidul bisa saja dilihat dari pendekatan sumbangan potensi serta kemampuan responsif daerah. Namun gambaran perubahan desa sedikit sekali dapat dipahami, atau setidaknya yang nampak adalah desa yang lamban sekali perubahannya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kunci utama untuk menjelaskan perubahan yang sedang terjadi adalah mudarnya isolasi daerah tersebut, baik isolasi geografis maupun isolasi sosial-ekonomis. Dengan begitu pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta upaya budidaya pertanian adalah merupakan kegiatan pembangunan yang sangat besar peranannya dalam membuka isolasi daerah tersebut.

Pembangunan jalan-jalan, baik itu jalan propensi maupun jalan kabupaten, telah mampu mengembangkan transportasi jarak dekat atau lokal dan transportasi jarak jauh. Hal yang terakhir itu sangat besar peranannya dalam membuka isolasi daerah penelitian. Dari persektif Durheimian terciptanya transportasi jarak jauh ini merupakan pintu masuk bagi berlangsungnya proses difusi kultural, yakni masuknya budaya kota ke tengah-tengah pedesaan. Proses difusi budaya ternyata bukan proses yang melibatkan seluruh masyarakat. Urbanisme atau cara-cara hidup kekotaan sebagai bentuk difusi budaya tersebut bukan merupakan ciri khas semua warga desa penelitian. Dalam masyarakat desa penelitian terdapat sekelompok masyarakat yang tertinggal dan muncul sebagai semacam kelompok oposan. Gejala ini hampir mirip dengan yang terjadi di daerah sub-urban lainnya, yakni terjadi pemisahan dua golongan masyarakat suburban dan nativ. Golongan sub urban adalah kelompok masyarakat yang berorientasi kekotaan dan bermata pencarian non-agraris, sedangkan golongan native adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pedesaan dan bermata pencarian agraris.

Di daerah penelitian, kelompok masyarakat yang mirip dengan kelompok sub-urbani tersebut adalah mereka yang melakukan migrasi musiman di kota-kota, yang kehidupannya tergantung pada kota. Selain itu adalah mereka yang menerima kiriman uang dari kota, baik dari anak-anak mereka atau dari suami atau istri. Satu hal yang membedakan dari kelompok native, sekalipun sebenarnya mereka juga masih bermata pencarian dari sektor pertanian, adalah mobilitasnya tinggi, bentuk

rumah serta parobotnya, cara berpakaian, dan sebagainya.

Apabila urbanisme serta pengaruh eksternal dari kota dikaitkan dengan perubahan struktural, terutama dengan sistem pelapisan sosialnya, terdapat gejala munculnya kelompok elite baru berdampingan dengan kelompok elite lama atas dasar penguasaan sumber ekonomi lokal. Sementara itu kelompok elite baru yang terbentuk adalah mereka yang mampu memanfaatkan peluang ekonomis dari hubungan yang semakin terbuka dari dunia luar. Banyak dari elite baru ini berasal dari lapisan bawah yang terdesak dan terpaksa mengadu nasib di kota-kota besar. Oleh karena persaingan di kota sedemikian keras, maka syarat fisik maupun psikis yang kuat menjadi tuntutan utama. Dengan demikian dapatlah dimengerti apabila kelompok elite ini umumnya terdiri dari kaum muda yang sukses.

Keberadaan elite baru, sekalipun belum jelas betul sosoknya namun kehadiran mereka dapat dirasakan. Sebagai contoh, apabila ada salah seorang warga desa mengadakan hajatan, elite baru ini selalu mendapat perlakuan istimewa. Duduk terpisah dari kelompok lainnya, gaya berpakaian, gaya berbicara dan perilaku keseharian berbeda dari kelompok elite lama yang terdiri dari bekas birokrat desa.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi telah mendorong terciptanya perubahan di tingkat desa, terutama dalam proses difusi budaya. Sementara itu di sektor pertanian juga mengalami perubahan dengan masuknya program pembangunan. Hilangnya wabah paceklik, penanaman jenis-jenis tanaman keras baru, merupakan contoh dari gejala-gejala baru yang mengakibatkan munculnya proses diferensiasi dalam

masyarakat. Terdapat indikator bahwa peningkatan produktivitas pertanian serta nilai tambah yang diperoleh melalui budi daya pertanian, disatu sisi merupakan akses untuk masuk ke dalam pola hidup semi urban dan di satu sisi lainnya yakni menjadi kekuatan penyeimbang dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kelompok elite baru yang umumnya terdiri dari wiraswastawan sukses atau para pekerja urban sekalipun mereka secara fisik sudah meninggalkan kampung halaman, tetapi ikatan bathin dan kekerabatan masih dijaga dengan ketat. Bentuk mekanisme untuk melindungi ikatan tersebut adalah kelompok sukses akan selalu mengajak warga desa untuk meraih sukses seperti mereka. Selain itu juga sumbangan materi yang diberikan kepada desa tidak saja dimanfaatkan untuk pembangunan desa tetapi juga untuk mengembangkan pendidikan. Hal ini berarti pula bahwa kemajuan pendidikan yang mampu mengantarkan pemuda pemuda desa penelitian untuk mencari alternatif pekerjaan di luar pertanian, juga mempunyai kaitan erat dengan kelompok "pioner" yang telah sukses di kota-kota.

CATATAN

- ¹Dilihat dari potensi sumber daya alamnya, daerah lahan kering dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, daerah non-sawah yang relatif kurang subur dan kedua, daerah dataran tinggi yang umumnya merupakan daerah perkebunan dengan berbagai jenis tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Tulisan ini akan mengacu pada pengertian lahan kering klasifikasi pertama.
- ²Palte, Jan G.L., "Pertanian Lahan Kering di Jawa: Asal-Usul dan Perkembangannya" dalam Agro-Ekonomika No. 23, 1985, hlm. 98-112.
- ³Palte, hlm. 100-101.
- ⁴Soedarwono Hardjosoediro, Feasibility Study Daerah Kritis Gunungkidul. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan, UGM, hlm. 30.
- ⁵Dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 148.536 Ha, 93.577,68 diantaranya berupa tanah kritis atau 63 prosen dari luas wilayah. Dikutip dari Data Kantor Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul dalam Tabel berjudul: "Luas Persebaran Tanah Kritis Di luar Kawasan Hutan".
- ⁶Buku Laporan Tahunan Dinas Pengairan Kabupaten Gunungkidul, 1984, hlm. 9.
- ⁷Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat). Jakarta: Arsip Nasional RI, 1975.
- ⁸Bappeda Daerah Tingkat II Subang, Subang Dalam Angka, 1988, hlm. 54.
- ⁹Scott, James C., Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Pemberontakan Petani di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 32.
- ¹⁰Otto Sumarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 1983, hlm. 259.
- ¹¹Wolf, Eric R., Petani, Suatu Tinjauan Antropologis. Jakarta: CV Rajawali, 1983, hlm. 19.

¹²Barlett, Peggy F., "Cost Benefit Analysis: A Test of Alternative Methodologies", dalam Peggy F. Barlett (ed), Agricultural Decision Making. Anthropological Contributions to Rural Development. New York: Academic Press Inc, 1980, hlm 142-143.

¹³Bahasan mengenai pemilikan tanah komunal dan tanah perorangan banyak mengutip dari Djoko Suryo, R.M. Soedarsono, dan Djoko Soekiman, Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya. Yogyakarta: Dep Dik Bud Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985, hlm. 14-15.

¹⁴John Ihalauw et al., "Penguasaan Tanah Serta Implikasinya Terhadap Keketatan Budidaya" dalam Mubyarto (Penyunting), Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. Yogyakarta: BPFE, 1985, hlm. 240.

¹⁵Collier, William L., "Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembangunan Desa di Jawa", Prisma No. 6. Jakarta: LP3ES, 1974, hlm. 14.

¹⁶Budhisantoso S, "Pembangunan dan Pengaruhnya Pada Kegiatan Derep", dalam Berita Antropologi, Tahun ke VII, hlm. 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlett, Peggy F., "Cost Benefit Analysis: A Test of Alternative Methodologies", dalam Peggy F Barlett (ed.), Agricultural Decision Making. Antropological Contribution to Rural Development. New Yprk: Academic Press Inc, 1980.
- Breman, Jan, Dynamics of Poverty and Prosperity: Rural South Gujarat towards the end of the Twentieth Century. Manuscrip. 1990.
- Bappeda Daerah Tingkat II Subang, Subang Dalam Angka, 1988.
- Buku Laporan Tahunan Dinas Pengairan Kabupaten Gunung kidul. 1984.
- Budhisantoso S, "Pembangunan dan Pengaruhnya pada Kegiatan Derep", dalam Berita Antropologi, Tahun VII.
- Collier, William L., "Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembangunan Desa di Jawa", Prisma No. 6. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Scott, James C., Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Pemberontakan Petani di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Djoko Suryo, R.M. Soedarsono, Djoko Sukiman, Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya. Yogyakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985.
- Data Kantor Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Gunung kidul, 1986.
- John Ihalauw et. al., "Penguasaan Tanah Serta Implikasinya terhadap Keketatan Bididaya", dalam Mubyarto (ed.), Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. Yogyakarta: BPFE, 1985.
- Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat). Jakarta: Arsip Nasional RI, 1975.
- Otto Sumarwoto, Ekologi, Lingkungan hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 1983.

Palte, Jan G.L., "Pertanian Lahan Kering di Jawa: Asal Usul dan Perkembangannya", Agro-Ekonomika, No. 23, 1985.

Rizwanul Islam, "Non-Farm Employment in Rural Asia: Dynamic Growth or Proletarianization", Journal of Contemporary Asia. 14 (3), 1985.

Soedarwono Hardjosoediro, Feasibility Study Daerah Kritis Gunungkidul. Yogyakarta: Fakultas Pertanian, UGM, 1985.

